

**KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PROGRAM
KONSERVASI LAUT DI TAMAN NASIONAL
KEPULAUAN SERIBU**

AMINAH SWARNAWATI



**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2018**

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul “Komunikasi Lingkungan dalam Program Konservasi Laut di Taman Nasional Kepulauan Seribu” adalah benar karya saya, dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Oktober 2018

Aminah Swarnawati
NIM 1362130041

RINGKASAN

AMINAH SWARNAWATI. Komunikasi Lingkungan dalam Program Konservasi di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Dibimbing oleh AMIRUDDIN SALEH, BASITA GINTING SUGIHEN, ENDRIATMO SOETARTO dan ARIF SATRIA.

Penelitian dalam kajian komunikasi lingkungan ini melihat hubungan antara manusia dan lingkungan atau yang dikenal dengan konsep ekologi manusia. Program konservasi laut merupakan salah satu upaya menjaga pelestarian alam, penelitian ini mengkaji mengenai konservasi laut yang diterapkan di Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS), berdasarkan UU No 5 tahun 1990.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian studi kasus, dan paradigma *postpositivist*, didasari teori komunikasi lingkungan dan advokasi lingkungan dari Robert Cox, komunikasi advokasi dari Quarry dan Ramirez, dialog dari Buber dan Karlsson. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis proses komunikasi mengenai kebijakan konservasi di tingkat pemangku kepentingan dalam program konservasi di TNKpS; (2) menganalisis proses komunikasi antar nelayan pada forum komunikasi informal nelayan; dan (3) mengevaluasi strategi komunikasi advokasi lingkungan sebagai artikulasi kepentingan nelayan dalam mencegah terjadinya marjinalisasi nelayan.

Studi menunjukkan bahwa komunikasi antar pemangku kepentingan pada level pemerintah dilakukan rapat pimpinan setiap hari senin dan juga rapat koordinasi. Komunikasi antar instansi pemerintah menunjukkan masih ada disharmoni, masih adanya perbedaan kebijakan, perbedaan ukuran batas wilayah, masalah otoritas kewenangan dan masalah perijinan antara Balai TNKpS dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Pada level pemerintah dan nelayan masih ada disharmoni dalam masalah zonasi dan pelarangan Alat Penangkapan Ikan (API). Antara nelayan dan bisnis wisata terjadi sinergi dalam kegiatan wisata bahari.

Cara mengomunikasikan pesan konservasi dari Balai TNKpS kepada nelayan tidak selalu melalui penyuluhan yang formal, akan tetapi memanfaatkan forum nelayan, suatu forum informal tempat nelayan berbagi informasi sambil *kongkow-kongkow* di dermaga, sering disebut tempat *kongkow* khas orang Pulo. Saluran komunikasinya baik saluran interpersonal, kelompok maupun bermedia. Meskipun demikian aksi nelayan masih juga terjadi, terakhir di tahun 2017 mereka melakukan aksi protes ke Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 71/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan (API), di mana salah satunya adalah pelarangan penggunaan jaring *muroami*. Walaupun pendekatan kepada nelayan sudah dilakukan dengan saluran interpersonal maupun kelompok, komunikasi dibangun dua arah, akan tetapi peraturan yang diberlakukan tetap dianggap *top-down*.

Penelitian juga melihat bagaimana komunikasi terjadi antar pemangku kepentingan. Pemanfaatan forum informal nelayan sebagai sarana sosialisasi oleh Balai TNKpS bermaksud mengurangi jarak antara keduanya, dan komunikasi yang terbangun lebih bersifat dua arah. Tempat *kongkow* merupakan forum yang autentik, karena dibentuk oleh nelayan sendiri tanpa campur tangan pemerintah dan aktor-aktornya juga tidak terkooptasi, sehingga memungkinkan terjadinya

komunikasi emansipatoris antar nelayan. Komunikasi emansipatoris hanya terjadi di antara nelayan yang selevel, akan tetapi jika ada keterlibatan nelayan yang kelasnya lebih tinggi bisa terjadi dominasi pula. Dialog yang terjadi adalah dialog asli (*genuine*), apabila komunikasinya terjadi antar nelayan pada level yang sama. Dalam dialog asli tidak ada kalah menang, karena semua menang. Salah satu kendala dalam dialog adalah ‘kecenderungan untuk mengevaluasi’ kadang dilakukan oleh nelayan yang lebih tinggi pendidikannya sehingga lebih kritis.

Apabila dikaitkan dengan pendekatan konservasi, pendekatan yang dilakukan oleh Balai TNKpS saat ini cenderung ke arah konservasionis, begitu pula yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rare sebagai mitra Balai TNKpS. Pendekatan developmentalis dilakukan sebelum reformasi, pendekatan eko populis di TNKpS tidak terlalu menonjol.

Studi juga menunjukkan bahwa fungsi advokasi tidak dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat yang menjadi mitra Balai TNKpS. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rare tidak melakukan advokasi, mereka melakukan pemberdayaan dan perubahan perilaku nelayan menggunakan pendekatan pemasaran sosial (*social marketing*) dalam menyebarkan pesan kebijakan konservasi.

Strategi komunikasi advokasi lingkungan berupa retorika kritis melalui artikulasi kebijakan alternatif, dilakukan oleh Balai TNKpS berupa masukan bagi perubahan UU No.5/1990 dan oleh Sudin KPKP dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi. Artikulasi visi dan ideologi untuk mencapai cita dan citra di masa depan, dilakukan dengan melibatkan generasi muda, caranya generasi muda sedini mungkin dididik menjadi kader konservasi. Strategi komunikasi advokasi lingkungan juga dilaksanakan melalui kampanye advokasi (*advocacy campaign*), kampanye dilaksanakan menggunakan media kampanye lini bawah untuk sosialisasi seperti plang, spanduk, *banner* yang tersebar di berbagai sudut pulau, dan media komunitas Radio Kepulauan Seribu (RPS). Target audienskampanye yang paling utama adalah nelayan, tujuannya nelayan bisa memahami dan mematuhi aturan zonasi yang diterapkan, mereka tidak melanggar masuk ke zona inti. Selain itu merubah perilaku nelayan yang aktivitas nelayannya merusak lingkungan karena menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Selain nelayan, wisatawan yang berkunjung dan masyarakat umum juga menjadi sasaran kampanye, karena aktivitas wisata dan aktivitas warga sehari-hari juga berpotensi merusak lingkungan. Pendekatan persuasi diterapkan dalam kampanye, komunikasi persuasif penting supaya audiens terbujuk dan secara perlahan merubah perilakunya.

Katakunci: dialog, komunikasi advokasi, komunikasi lingkungan, konservasi, pemangku kepentingan, strategi komunikasi advokasi lingkungan

SUMMARY

AMINAH SWARNAWATI. Environmental Communication in the Marine Conservation Program in KepulauanSeribuNational Park. Supervised by AMIRUDDIN SALEH, BASITA GINTING SUGIHEN, ENDRIATMO SOETARTO and ARIF SATRIA.

This environmental communication research looks at the relationship between human and the environment or better known as the concept of human ecology. The marine conservation program seeks to safeguard nature conservation, this study examines the marine conservation applied in KepulauanSeribuNational Park (TNKpS), according to law no. 5 year 1990.

The study used a qualitative approach, a case study research method, and a postpositivist paradigm, based on environmental communication theory and Robert Cox's environmental advocacy, Quarry and Ramirez's advocacy communication, Buber and Karlsson's dialogues. Based on the said background and problems, this study aims to: (1) analyze the communication process on conservation policy at the stakeholder level in conservation programs in TNKpS; (2) analyze the process of communication between fishermen in informal fishermen communication forums; and (3) evaluate the environmental - advocacy communication strategy as an articulation of the interests of fishermen in preventing the marginalization of fishermen.

The study shows that communication between stakeholders at the government level is conducted through leaders meeting and coordination meeting every Monday. Communication between government agencies shows that there is still disharmony, there are still differences in policies, differences in the size of the territorial boundaries, the authority issue and licensing issues between the TNKpS Office and the Regional Government. Problems at the government and fisherman level are zoning and prohibitions on API (Fishing Equipment). However, there is a synergy between fishermen and tourism businesses in marine tourism activities.

The way to communicate the conservation message from the TNKpS Center to fishermen is not always through formal counseling, but utilizes a fishermen forum, an informal forum where fishermen share information while hanging out on the dock, often called a Pulo-style hangout. The communication channels are both interpersonal, group and mediated. Fishermen's actions nevertheless remain occur. Most recently in 2017, they protested to the Food, Marine and Agriculture Resilience Office (KPKP Sub-Department) regarding the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries No. 71/2016 concerning fishing lanes and placement of fishing gear (API), where one of them is the prohibition on the use of *muroami* nets. Despite the approach to fishermen with interpersonal and group channels, communication built in two directions, the regulations applied remain considered top-down.

The research also looks at how communication occurs between stakeholders. The use of informal fishermen forums as a means of TNKpS socialization medium, aims to reduce the distance between the said two's, and the

communication built is more two-way. The hangout is an authentic forum since it is formed by the fishermen themselves without government interference and the actors are not co-opted. It enables an emancipatory communication between fishermen. Emancipatory communication only occurs among fishermen who are at the same level. There can be a domination among them if higher class fishermen involved. Dialogue that occurs is genuine if the communication occurs between fishermen at the same level. There will no defeat or win in the original dialogue because all win. One of the obstacles in dialogue is the 'tendency to evaluate' sometimes carried out by educated fishermen who are more critical.

Relating to conservation approaches, the one currently taken by Balai TNKpS tends to be conservationist as well as their partner's, thr Rare NGO, the developmentalist approach was carried out before reform era, the eco-populist approach was not very prominent.

The study also shows that the advocacy function is not carried out by non-governmental organizations partnering with the TNKpS Office named Rare Non-Governmental Organizations (NGOs) They do not conduct advocacy, but to empower and change the behavior of fishermen using social marketing approaches in disseminating conservation policy messages.

The strategy of environmental advocacy communication in the form of critical rhetoric (rhetorical critical) through alternative policy articulation, by the TNKpS Office as inputs for the amendment of Law No.5 / 1990 and the KPKP Sub-Department in the amendment of the Zoning Local-Regulation. Articulation of vision and ideology to achieve the future goal and image, carried out by involving young people, how young people as early as possible are educated to become conservation cadres. The strategy of environmental advocacy communication was also carried out through advocacy campaign, using the bottom line campaign media for socialization such as signposts, banners, banners spread across various corners of the island, and community radio named Radio Kepulauan Seribu (RPS). The main target of the campaign audience is fishermen, its goal that they are able to understand and comply with the zoning rules applied, they do not break into the core zone. In addition, it changes the behavior of fishermen whose fishing activities damage the environment because using fishing gear that is not environmentally friendly. Tourists or visitors are also the target of the campaign since tourism activities and daily activities of the people also have the potentials to damage the environment. Persuasion approaches are applied in campaigns, persuasive communication is important in order to persuade and slowly change audience's behavior.

Keywords: advocacy communication, conservation, dialogue, environmental communication, stakeholder, communication strategy of environmental advocacy.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

**KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PROGRAM
KONSERVASI LAUT DI TAMAN NASIONAL
KEPULAUAN SERIBU**

AMINAH SWARNAWATI

Disertasi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
pada
Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan
Pedesaan

**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2018**

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tertutup:

1. Dr Ir Budi WiryawanMSc
(Dosen Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB)
2. Dr Ir Djuara P Lubis MS
(Dosen Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Fakultas Ekologi Manusia IPB)

Penguji Luar Komisi pada Sidang Promosi :

- 1.Dedi Supriadi Adhuri Ph.D
(Peneliti Senior pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI)
2. Dr Ir Djuara P Lubis MS
(Dosen Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia IPB)

Judul Disertasi: Komunikasi Lingkungan dalam Program Konservasi Laut di
Taman Nasional Kepulauan Seribu

Nama : Aminah Swarnawati

NIM : I362130041

Disetujui oleh
Komisi Pembimbing

Dr Ir Amiruddin Saleh MS
Ketua

Dr Ir Basita Ginting S MA
Anggota

Prof Dr Endriatmo Soetarto MA
Anggota

Dr Arif Satria SP MSi
Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Komunikasi Pembangunan
Pertanian dan Pedesaan

Dr Ir Sarwititi Sarwoprasodjo, MS



Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof Dr Ir Anas Miftah Fauzi, MEng

Tanggal Ujian Tertutup: 20 Juli 2018
Tanggal Sidang Promosi: 28 agustus 2018

Tanggal lulus: 28 AUG 2018

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala karunia-Nya sehingga disertasi ini berhasil diselesaikan. Penelitian dengan judul Komunikasi Lingkungan dalam Program Konservasi Laut di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Penelitian melihat bagaimanaproses komunikasi kebijakan konservasisesuai UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem serta Permenhut No.56 tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.Penelitian mengambil lokus pada wilayah konservasi laut Taman Nasional Kepulauan Seribu.

Sebagai sebuah kebijakan, program konservasimembutuhkan partisipasi masyarakat yang menjadi *target group*, dalam penelitian ini adalah nelayan serta parapihak yang menjadi pemangku kepentingan. Penelitianmenunjukkan bagaimana proses komunikasi berlangsung di antara pemangku kepentingan, dan bagaimana nelayansaling berdialog di forum informal mereka. Selain itu bagaimana strategi komunikasi advokasi lingkungan dijalankan, baik melalui retorika kritis maupun melalui kampanye advokasi sebagai bentuk artikulasi kepentingan nelayan dalam mencegah marjinalisasi nelayan.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak Dr Ir Amiruddin Saleh, MS selaku ketua komisi pembimbing; kepada Bapak DrIr Basita Ginting, MA; Bapak Prof Dr Endriatmo Soetarto, MA dan Bapak Dr Arif Satria, SP, MSi selaku anggota komisi pembimbing serta kepada Ibu Dr Ir Sarwititi Sarwoprasodjo, MS selaku ketua Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan di KMP 2013 (bu Janti G Sujana, pak Yudi LA Salampessy, pak Yanuar Luqman, teh Diana Berlianti, mas M. Badri, Ail Muldi), terima kasih diskusi dan *sharing* informasi maupun buku-buku yang sangat bermanfaat, juga dorongan semangatnya selama berproses bersama di IPB. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada mbak Hety dan mbak Lia atas bantuannya selama ini. Kepada keluarga bani Ruzbar dan bani Harun terima kasih untuk dukungan dan doa tulusnya. Terima kasih kepada rekan-rekan FISIP UMJ, ibu Dekan Dr Endang Sulastri dan Dekanat FISIP UMJ; serta seluruh sivitas akademika UMJ, rekan-rekan Prodi Komunikasi FISIP UMJ: Bapak Dr Fal Harmonis; ibu Tria, M Ikom, ibu Dr Nani Nurani Muksin; ibu Lilik Sumarni, M.Si; bapak Amin Shabana, M.Si; bapak Daniel Handoko, M.Ikom; bapak Sofiandy Zakaria, M.Psi dll; kepada yang sedang bersama menimba ilmu di KMP IPB: ibu Sa'diyah El Adawiyah, M.Si, ibu Oktaviana Purnamasari, M.Si dan ibu Wichitra Yasha, M.Comm. Terima kasih pula kepada pihak Balai TNKpS, Pemkab Kepulauan Seribu, Sudin KPKP, LHK, Parbud, Villa Delima dan semua informan nelayan

Akhirul kalam, tidak ada manusia yang sempurna apalagi karya manusia hanya butiran debu dari kebesaran Allah SWT, semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu komunikasi pembangunan.

Bogor, Oktober 2018

Aminah Swarnawati

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
1 PENDAHULUAN	9
Latar Belakang	9
Perumusan Masalah	5
Tujuan Penelitian	6
Manfaat Penelitian	6
<i>Novelty</i>	7
2 TINJAUAN PUSTAKA	7
Komunikasi Lingkungan sebagai Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan	7
Komunikasi Ekologi dan Ekologi Politik	14
Dialog dan Komunikasi Advokasi	18
Nelayan sebagai Aktor/Subjek dan Pemangku Kepentingan	22
Penelitian Terkait Sebelumnya	24
Kerangka Pemikiran	26
3 METODE PENELITIAN	29
Paradigma Penelitian	29
Pendekatan Penelitian	30
Strategi Penelitian	31
Lokasi dan Waktu Penelitian	31
Informan Penelitian	31
Pengumpulan Data	32
Analisis dan Interpretasi Data	34
4 HASIL DAN PEMBAHASAN	36
Deskripsi Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Konservasi	36
Komunikasi Kebijakan Konservasi Antar Pemangku Kepentingan	51
Komunikasi dalam Forum Nelayan	90
Strategi Advokasi Lingkungan: Artikulasi Kepentingan Nelayandalam Mencegah Marjinalisasi	108
Implementasi Kebijakan Pengelolaan TNKpS	125
Implikasi Teoritis	139
5 SIMPULAN DAN SARAN	140
Simpulan	140
Saran	141

DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	149
RIWAYAT HIDUP	155

DAFTAR TABEL

1. Perbedaan antara konsevasionisme, eko-populisme dan developmentalisme	17
2. Literatur penelitian sebelumnya	24
3. Perkembangan kegiatan konservasi dan keorganisasian di Indonesia	47
4. Pulau-Pulau di Kelurahan Pulau Panggang	49
5. Peruntukan wilayah pulau pada tiap RT/RW	50
6. Jumlah penduduk menurut pendidikan dan pekerjaan	50
7. Analisis <i>stakeholder</i> konservasi di TNKpS, 2018	54
8. Saluran komunikasi dalam penyebaran pesan konservasi, 2018	78
9. Analisis pendekatan konservasi di TNKpS, 2018	89
10. Jaringan kekuasaan di dalam masyarakat nelayan TNKpS, 2018	96
11. Hasil Pengamatan kendala komunikasi dialogis pada nelayan, 2018	101
12. Analisis swot strategi komunikasi advokasi lingkungan, 2018	124
13. Perbandingan aturan perundangan terkait konservasi, 2018	136

DAFTAR GAMBAR

1. Skema hubungan alam/lingkungan, komunikasi dan ruang publik	9
2. Gerakan konservasi	16
3. Kerangka teoritik penelitian	28
4. Proses analisis data kualitatif	35
5. Tahapan proses penelitian kualitatif yang dilakukan	35
6. Peta Taman Nasional Kepulauan Seribu	39
7. Pengelompokkan pemangku kepentingan konservasi di TNKpS, 2018	54
8. Kerangka komunikasi antar pemangku kepentingan di TNKpS, 2018	55
9. Proses komunikasi antar pemangku kepentingan level pemerintah, 2018	60
10. Pesan konservasi yang dikomunikasikan di TNKpS, 2018	68
11. Gambaran proses komunikasi konservasi kepada nelayan, 2018	79
12. Pola komunikasi antar parapihak, 2018	85
13. Peta konflik antar parapihak, 2018	86
14. Peta zonasi di TNKpS (TNKpS, 2017)	130

DAFTAR LAMPIRAN

1. Panduan wawancara	149
2. Panduan observasi	153
3. Panduan FGD	154

DAFTAR SINGKATAN

1. TNKpS = Taman Nasional Kepulauan Seribu
2. KPKP = Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian
3. API = Alat Penangkap Ikan
4. LSM = Lembaga Swadaya masyarakat
5. PARBUD = Pariwisata dan Kebudayaan
6. LHK = Lingkungan Hidup dan Kebersihan
7. KKP = Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. KLHK = Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. SDA = Sumber daya alam
10. JAAN = Jakarta Animal Aid Network
11. SPKP = Sentra Penyuluhan Konservasi Pedesaan
12. MMP = Masyarakat Mitra Polhut
13. MDK = Model Desa Konservasi
14. WPPNRI = Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15. BPK = Badan Pemeriksa Keuangan
16. BKPKKL = Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Karang Lebar
17. PPSTA = Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur
18. KSA = Kawasan Sumber Daya Alam
19. KPA = Kawasan Pelestarian Alam
20. KSDA = Konservasi Sumber Daya Alam
21. KSDAE = Konservasi Sumber daya Alam Hyati dan Ekosistemnya
22. SDGs = Sustainable Development Goals
23. PHU = Peruntukan Hijau Alam
24. PHKA = Perlindungan Hutan Konservasi Alam
25. PHPA = Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
26. TPU = Tempat Pemakaman Umum
27. RT = Rukun Tetangga
28. RW = Rukun warga
29. Musrenbang = Musyawarah Perencanaan Pembangunan
30. Tupoksi = Tugas Pokok dan Fungsi
31. SDGs = *Sustainable Development Goals*
32. KSPN = Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
33. CSR = *Corporate Social Responsibility*
34. TN = Taman Nasional

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalahan lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan manusia, begitu pula di Indonesia yang mempunyai kekayaan lingkungan hidup yang luar biasa, baik di daratan maupun lautan. Dalam arena internasional ada program SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang menaruh perhatian bukan hanya pada pengembangan manusia (*human development*), tetapi juga pengembangan ekonomi dan lingkungan sebagai bagian dari agendanya. Program SDGs disusun dengan melibatkan Negara-negara yang memberlakukan SDGs, termasuk Indonesia. Di Indonesia untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ditetapkan Perpres No.59/2017 supaya ada penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Hubungan manusia dengan lingkungannya merupakan masalah yang penting karena selain menjadi perhatian dari program SDGs, juga bertujuan supaya pembangunan yang dilaksanakan berkelanjutan. Penelitian melihat faktor manusia dalam hubungannya dengan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan konsep ekologi manusia; yakni suatu pandangan yang mencoba memahami keterkaitan antara spesies manusia dan lingkungannya (Forsyth 2003). Salah satu tekanan inti ekologi manusia adalah adaptasi manusia terhadap lingkungan yang terdapat di sekitarnya.

Konservasi alam merupakan salah satu upaya melindungi kerusakan dan kelestarian alam menuju pembangunan berkelanjutan. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAE) adalah produk perundangan yang menjadi payung dalam melaksanakan konservasi di Indonesia. Tujuan konservasi sumber daya alam adalah untuk kesejahteraan masyarakat juga mutu kehidupan manusia sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungannya dan tercipta hubungan yang saling menguntungkan, bukan hubungan eksploitatif di mana manusia memanfaatkan alam tanpa memperhatikan efek jangka panjangnya terhadap ekosistem dan akibatnya berbalik kepada manusia itu sendiri yang mengalami kerugian karena sumber daya alam yang semakin habis.

Dalam proses mengomunikasikan kebijakan konservasi, pemerintah merupakan lembaga yang berkepentingan terhadap tersampainya pesan mengenai konservasi secara tepat sasaran, dan dapat diterima secara benar pada masyarakat yang menjadi sasaran, dengan tujuan selain masyarakat menjadi paham mengenai pentingnya menjaga lingkungan, kemudian menjadi sadar dan bersikap mendukung kebijakan yang ditujukan kepada mereka, dan pada akhirnya setelah timbul kesadaran akan merubah perilaku nelayan yang berpotensi merusak lingkungan. Perilaku nelayan yang merusak lingkungan, misalnya adalah menggunakan alat menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, bagi wisatawan dan pelaku usaha wisata adalah melakukan kegiatan wisata yang merusak lingkungan, seperti menginjak karang pada saat *snorkeling*, bagi masyarakat